

MAKALAH KEBIJAKAN
POLICY PAPER

DOKUMEN KAJIAN PENINGKATAN DAYA SAING
PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG, DESEMBER 2017

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pernyataan tujuan.....	1
1.3. Metode.....	2
2. Pembahasan	3
2.1. Posisi Daya Saing Lampung 2014-2017	3
2.2. Analisis Daya Saing Provinsi Lampung.....	4
2.3. Rekomendasi	5

Halaman Pengesahan
MAKALAH KEBIJAKAN
POLICY PAPER

DOKUMEN KAJIAN PENINGKATAN DAYA SAING
PROVINSI LAMPUNG

Hasil kerjasama antara
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
Dengan
LPPM Universitas Lampung

Tanggal: Desember 2017

Kepala Badan,

Kepala Bidang,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19671210 198909 1 001

Dr. A. ZOELKARNAIN R, S.T.,M.Si.P.
Pembina (IVa)
NIP. 19681427200003 1 003

Ringkasan Eksekutif

Daya saing daerah merupakan salah satu dari tiga indikator kunci keberhasilan pemerintah daerah mengelola sumber daya yang ada dalam melaksanakan pembangunan daerah. Beberapa lembaga internasional pun secara berkala menerbitkan hasil pemeringkatan daya saing baik dalam skala daerah maupun nasional. Dengan demikian, daya saing daerah merupakan elemen penting untuk mendukung pembangunan daerah.

Asia Competitiveness Institute (ACI), lembaga riset mengenai kebijakan publik dari *National University of Singapore (NUS)* pengukuran dan pemeringkatan daya saing daerah di 33 provinsi di Indonesia. Pengukuran daya saing dilakukan berdasar 4 aspek/environment yaitu: Stabilitas Ekonomi Makro, Pemerintahan dan Institusi Publik, Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja dan Kualitas Hidup dan Perkembangan Infrastruktur. Berdasar empat aspek utama tersebut dilakukan digunakan 103 indikator pengukuran untuk menentukan daya saing suatu daerah.

Pada penilaian di tahun 2014 terhadap indikator-indikator di tahun 2013, provinsi Lampung berada di peringkat 24 dari 33 provinsi (10 provinsi dengan daya saing terburuk). Tetapi, dengan proses pembangunan yang baik dan peningkatan tata kelola pemerintah daerah yang baik, provinsi Lampung mengalami peningkatan 10 peringkat ke posisi 14. Bahkan pada aspek Pemerintahan dan Institusi Publik (PIP) dan Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja (KFBT) berada diperingkat 11.

Melihat perkembangan tersebut, tentunya menjadi tantangan untuk memposisikan daya saing Provinsi Lampung untuk masuk dalam sepuluh besar nasional. Upaya tersebut harus didorong dalam wujud kebijakan pembangunan daerah yang diprioritaskan pada indikator pembentuk daya

saing yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk diformulasikan dalam strategi penguatan daya saing Provinsi Lampung ditahun mendatang.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Posisi daya saing suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya dalam lingkup nasional maupun internasional sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah tersebut dalam kancah persaingan global. Peringkat daya saing provinsi lampung dalam periode 2014-2017 terus menguat hingga saat ini berada di peringkat 14 nasional.

Berdasarkan hasil studi yang telah dilaksanakan oleh *Asia Competitiveness Institute* pada tahun 2014 yang lalu, daya saing Provinsi Lampung menduduki peringkat ke 24 (dua puluh) dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2015 peringkat daya saing daerah Provinsi Lampung justru mengalami penurunan menjadi peringkat ke 25 (dua puluh lima) dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pada 2017 peringkat daya saing Provinsi Lampung menjadi peringkat 14 dan menjadi peringkat 11 ditahun 2018 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Analisa yang komprehensif perlu dilakukan pemerintah provinsi Lampung untuk meningkatkan daya saing provinsi Lampung pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan alasan di atas maka perlu dilakukan kajian daya saing provinsi Lampung dan analisa strategi kebijakan untuk meningkatkan daya saing tersebut.

1.2. Pernyataan Tujuan

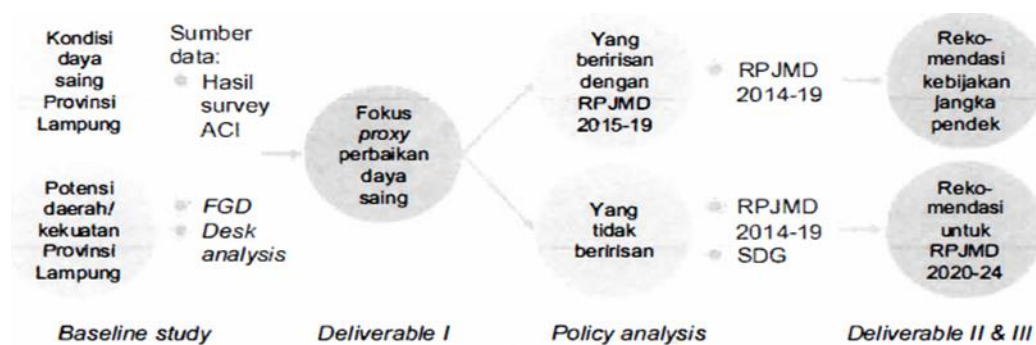
Maksud dari pekerjaan ini adalah melakukan analisis daya saing Provinsi Lampung dan strategi kebijakan untuk meningkatkan daya

saing Provinsi Lampung. Maksud tersebut dapat dicapai melalui pengkajian secara ilmiah yang bertujuan:

- a. Identifikasi sektor-sektor pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam peningkatan daya saing Provinsi Lampung berikut rekomendasi program dan kegiatan.
- b. Melihat prospek peningkatan daya saing provinsi dari indikator-indikator pembangunan yang ada di RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014-2019.
- c. Menghasilkan rekomendasi berupa indikator-indikator pembangunan serta target-targetnya untuk digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2025

1.3. Metode

Analisis dilakukan secara kualitatif dalam 2 tahapan, yaitu: 1) baseline study dan 2) policy analysis. Gambar di bawah ini mengilustrasikan kedua tahapan termaksud dengan lebih detail.



Tahapan pertama yaitu *baseline study*, bertujuan untuk memahami kondisi Provinsi Lampung, baik dari segi daya saing saat ini maupun dari segi potensi daerah dan sektor-sektor yang menjadi kekuatannya. Kondisi daya saing Provinsi Lampung mengacu pada hasil survey ACI, sedangkan daftar potensi daerah dan kekuatan Provinsi Lampung mengacu pada hasil FGD dan juga *desk analysis*

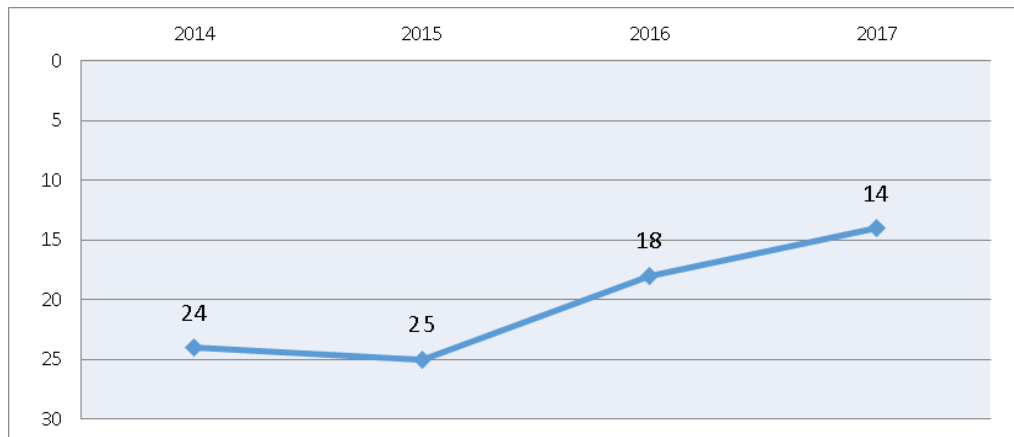
Tahapan kedua yaitu *policy analysis*, dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, baik jangka pendek (1 tahun) maupun jangka menengah (5 tahun). Hasil dari analisis pada tahapan ke-1, yaitu fokus ruang perbaikan, akan dibandingkan dengan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019. Perbandingan ini akan memilah fokus target ruang perbaikan ke dalam dua kelompok: pokok isi yang beririsan versus yang tidak beririsan dengan RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.

2. Pembahasan

2.1. Posisi Daya Saing Lampung 2014-2017

Hasil riset daya saing oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI) terhadap provinsi-provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa daya saing Provinsi Lampung semakin meningkat pada tiga tahun survey terakhir bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia.

Posisi Daya Saing Provinsi Lampung 2014-2017



Sumber: ACI NUS (2014-2017), data diolah

Capaian skor penilaian setiap aspek selama tiga tahun terakhir (2015-2017) mengalami tren yang semakin meningkat. Secara spesifik berdasar empat aspek utama, peningkatan peringkat dalam lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik (dari 19 ke 11), Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja (dari 16 ke 11), Stabilitas Ekonomi Makro (dari

22 ke 16), dan Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur (dari 24 ke 20).

Peringkat Daya Saing Provinsi Lampung Berdasar Aspek

Tahun	SEM	PIP	KFBT	KHPI	SEM	PIP	KFBT	KHPI
	SKOR				PERINGKAT			
2015	-0,5454 *	-0,9801 *	-0,4157 *	-0,4797 *	24	28	21	24
2016	-0,494 *	-0,182 *	-0,028 *	-0,33 *	22	19	16	23
2017	-0,274*	0,603	0,065	-0,141 *	16	11	11	20

Keterangan:

SEM: Stabilitas ekonomi makro;

PIP: Pemerintahan dan Institusi Publik;

KFBT: Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja;

KHPI: Kualitas Hidup dan Perkembangan Infrastruktur.

*) : Angka Dibawah Rata-rata Nasional

Aspek pemerintahan dan institusi publik memberikan kontribusi yang paling signifikan dengan lonjakan 17 peringkat dalam tiga tahun terakhir (2015-2017). Sementara aspek kualitas hidup dan perkembangan infrastruktur merupakan aspek dengan peringkat terendah dibandingkan ketiga aspek lainnya dengan hanya naik 4 peringkat.

2.2. Analisis Daya Saing Provinsi Lampung

Setelah dikaji lebih dalam ke level indikator pembentuk daya saing, terdapat 20 persen indikator yang mempunyai score terendah sebagai berikut:

Rank	20% Weakest Indicator	Score	Environment
81	Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-0,4404	KHPI
82	Akses Internet di Rumah	-0,4608	KHPI
83	Produktivitas Keseluruhan, nonmigas	-0,4627	KFBT
84	Jumlah Kepemilikan Komputer	-0,5085	KHPI
85	Rata-rata lama sekolah	-0,521	KHPI
86	PDRB Pr Kapita	-0,5504	SEM
87	Produktivitas Industri Sekunder	-0,5504	KFBT
88	Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,5591	SEM
89	Produktivitas Keseuruhan	-0,5616	KFBT
90	Rasio Murid Per Guru (Sekolah Dasar)	-0,5664	KHPI
91	Rasio Penduduk Per Pekerja Medis	-0,6205	KHPI
92	Produktivitas Industri Tersier	-0,7085	KFBT
93	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-0,7576	KHPI
94	Akses Internet dengan telepon Genggam	-0,8777	KHPI
95	Pertumbuhan Penduduk	-0,9012	KHPI
96	Penduduk Perkotaan	-0,9277	KHPI
97	Akses Internet di Kantor	-0,9296	KHPI
98	Jumlah Kepemilikan Laptop	-1,3915	KHPI

Rank	20% Weakest Indicator	Score	Environment
99	Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-1,3926	KHPI
100	Penduduk per jumlah cabang/kantor Bank	-2,6068	KFBT

Indikator terlemah yang diperoleh Provinsi Lampung adalah indikator penduduk per jumlah cabang/kantor bank tetap menjadi indikator dengan nilai terendah dengan skor -2,6068. Dilihat dari 4 aspek utama maka kualitas hidup dan perkembangan infrastruktur (KHPI) pada tahun 2017 mencapai 13 indikator yang memperoleh nilai terendah. Kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja (KFBT) memiliki 5 indikator dengan nilai terendah. Aspek stabilitas ekonomi makro (SEM) terdapat 2 indikator yang memiliki nilai terendah.

Untuk menjadikan Lampung menjadi Provinsi berdaya saing sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, maka Lampung harus mencapai kemajuan yang sama atau bahkan lebih dari rata-rata nasional dan standar yang telah di terapkan secara nasional.

2.2. Rekomendasi

Dari hasil analisis terhadap skor setiap aspek pembentuk daya saing menurut ACI, terdapat 13 indikator yang dianggap lemah yang perlu diperbaiki.

Indikator dan Bidang Kebijakan untuk Meningkatkan Daya Saing

NO	INDIKATOR	BIDANG KEBIJAKAN	ASPEK DAYA SAING
1	Kualitas dan kuantitas Infrastruktur	Infrastruktur	KHPI
2	Infrastruktur Kesehatan		
3	Infrastruktur Pendidikan		
4	Pendidikan	Pendidikan	
5	Bongkar Muat Kargo di Pelabuhan	Perhubungan	
6	Jumlah Penumpang Pesawat		
7	Produktivitas Industri Primer	Perindustrian	SEM
8	Produktivitas Industri Sekunder		
9	Produktivitas Industri Tersier		
10	Ekspor, nonmigas		
11	Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	Ketenagakerjaan	KFBT
12	Jumlah Pekerja di Sektor Tersier		
13	Tingkat Keamanan	Sosial Politik	PIP

Beberapa kelemahan dan potensi yang diuraikan di atas merupakan indikator-indikator daya saing Provinsi Lampung yang perlu didahulukan untuk diperbaiki karena merupakan indikator-indikator yang secara inheren dapat diperbaiki melalui kebijakan pembangunan.

a. Kebijakan Infrastruktur

Menurut ACI, aspek kualitas hidup dan perkembangan infrastruktur Provinsi Lampung merupakan aspek terlemah dan hanya berada pada peringkat 20 dari 33 Provinsi di Indonesia. Walaupun beberapa indikator mengalami kenaikan tetapi belum menyamai rata-rata nasional. Selain infrastruktur secara umum, secara khusus ACI menyoroti kualitas infrastruktur pada bidang pendidikan dan kesehatan.

b. Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan ACI, indikator pendidikan terutama partisipasi sekolah menengah atas dan ketersediaan tenaga pengajar di Provinsi Lampung masih rendah dan dibawah rata-rata nasional. Perlu upaya serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama sekolah menengah atas di Provinsi Lampung.

c. Kebijakan Perhubungan

Berdasarkan studi ACI, jumlah penumpang pesawat berada di bawah rerata Provinsi-Provinsi di Indonesia. Di sisi lain, arus bongkar muat kargo di pelabuhan domestik di Lampung juga masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi lain.

d. Kebijakan Perindustrian

Menurut studi ACI, produktivitas industri primer, sekunder, dan tersier di Lampung walaupun beberapa indikator mengalami peningkatan tetapi masih berada di bawah rerata nasional. Selain itu, ekspor non migas dari Lampung ke luar negeri juga relatif lebih rendah daripada rerata Provinsi-Provinsi di Indonesia. Lampung memiliki potensi pertanian dan agrobisnis untuk sektor primernya,

pengembangan industri pengolahan untuk sektor sekundernya, dan pengadaan jasa-jasa yang berkaitan dengan pariwisata lokal, termasuk hotel, restoran, transportasi, dan komunikasi untuk sektor tersiernya. Menimbang potensi alam Lampung, peningkatan industrialisasi pariwisata dapat dikerjakan. Ekspor atas olahan pertanian dan perkebunan di Lampung juga dapat dilakukan.

e. Kebijakan Ketenagakerjaan

ACI mencatat jumlah pekerja di sektor sekunder dan tersier di Lampung lebih rendah daripada rerata nasional. Peningkatan kuantitas tenaga kerja erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor sekunder dan tersier, sehingga meningkatkan partisipasi pekerja dari dalam dan luar Provinsi, sedangkan peningkatan kualitas tenaga kerja bergantung pada kualitas pelatihan dan pendidikan vokasi yang diselenggarakan di Lampung.

f. Kebijakan Sosial Politik

Walaupun skor Studi ACI menunjukkan bahwa persepsi keamanan meningkat, tetapi penilaian pelaku bisnis dan akademisi di Lampung mengenai persepsi tersebut lebih buruk daripada rerata Provinsi-Provinsi di Indonesia. Pada studi tersebut, tingkat Keamanan dijelaskan antara lain sebagai stabilitas politik, tingkat kriminalitas dan kekerasan, serta perlindungan atas hak kepemilikan properti. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas politik, menurunkan tingkat kriminalitas dan kekerasan, serta menegaskan perlindungan atas hak kepemilikan properti dengan lebih efektif.